

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2010-2012. Penelitian ini dilakukan pada seluruh pemerintah daerah Jawa Timur, data dalam penelitian ini bersifat sekunder yang di dapatkan langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan propinsi Jawa Timur, dan diolah dengan menggunakan SPSS 19.0. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 38 Kabupaten/Kota tahun 2010-2012. Teknik pengambilan data sampel yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil statistik Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rerata pengungkapan wajib dalam neraca pemerintah daerah pada tahun 2010 adalah 12,71 atau sebesar 37,38%, tahun 2011 adalah 11,84 atau sebesar 34,82% dan pada tahun 2012 adalah 12,35 atau sebesar 36,32% (Lampiran II). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pengungkapan wajib sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan masih sangat rendah

Selama tahun 2010-2012 mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pemerintah daerah di Jawa Timur masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menerapkan

pengungkapan wajib sepenuhnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), padahal pemberlakuan SAP sudah berjalan sejak tahun 2005 untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia, dan dari data yang terkumpul menunjukkan bahwa selama tahun 2010-2012 sebagian besar pemerintah daerah belum melakukan pengungkapan pada setiap item Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Padahal dalam setiap item yang diungkapkan dalam PSAP bersifat wajib untuk diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Agar pemerintah daerah dapat lebih transparan dan para pengguna laporan mendapat laporan yang informativ. Item PSAP yang paling jarang diungkapkan terdapat pada PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, yaitu item Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan hasil analisis dan uji t ditarik kesimpulan bahwa dari variabel independen yaitu *Size*, Jumlah SKPD dan Status Daerah menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Saat melakukan pengolahan data dengan uji regresi dimana dari variable-variabel tersebut diperoleh hasil bahwa seluruh variabel independen tidak mendukung kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada model pengujian yang tidak baik, sehingga tidak bisa membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Variabel yang digunakan

dalam penelitian ini hanya sedikit yang berpengaruh terhadap analisis regresi. Data yang digunakan belum menggunakan data terbaru, yaitu menggunakan data tahun 2010-2013. Data yang diperoleh tidak semuanya memenuhi kriteria sampel, bahkan terdapat beberapa sampel yang tidak bisa di dapatkan.

### **5.3 Saran**

Penelitian selanjutnya menggunakan variabel independen yang lebih variatif, sebaiknya menggunakan variabel independen lebih banyak lagi agar saat pengolahan data, mendapatkan model pengujian yang baik dan tingkat signifikannya tidak lebih dari *p-value*. Data yang digunakan sebaiknya data terbaru, batas tahun terakhir sebelum penelitian. Hal ini bertujuan agar seluruh data dapat diolah dan valid, karena akuntansi sector publik mengalami perubahan-perubahan peraturan yang cepat. Penelitian selanjutnya agar lebih selektif dalam memberikan kriteria-kriteria sampel yang akan digunakan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2010-2012.. Sidoarjo.
- Deddi Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Djoko Suhardjanto., Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)”. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8/No.1/November.1-194.
- Dwi Martani dan Annisa Lestiani. 2010. “Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia”. Makalah disampaikan pada Annual Meeting and Conference Asian Academic Accounting Association (AAAA). Bangkok. Thailand.
- Hermaningsih. 2009. “Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajerial pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. 2005. *Akuntansi Sektor Publik “Suatu Pengantar”*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi ke Tiga*. Jakarta : Erlangga.
- Imam Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muhammad Karya Satya Azhar. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Media Kusumawardani. 2012. “Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. *Accounting Analysis Journal*. 1 (Januari). Pp 28-35.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 2005. Penerbit Sinar Grafika.

Ramya Atyanta. 2010. *Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur)*, (Online). (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/310/257>, diakses 1 Mei 2014)

Rena Rukmita. 2010. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)”. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No.32, tentang Pemerintahan Daerah. 2004.

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

[www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)